
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS (PLB) DI DESA SUNGAI KELIK KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG

Nikodimus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, nangabayan@gmail.com

Abstract: *Development of border areas is the main program carried out by the government to open access in border areas. Currently, the government is very focused on developing border areas, one of which is by opening border crossing posts between countries. The development of this cross-border post is carried out so that it can have an impact on countries, regions and villages that have coordinate points in the construction of the Cross-Border Post itself. The construction of the National Border Post in Sungai Kelik Village is the hope and dream of the people in Sungai Kelik Village. Moving on from this problem, the author conducted research regarding Community Participation in the Construction of Cross-Border Posts in Sungai Kelik Village, Ketungau Hulu District, Sintang Regency. The aim of this research is to analyze and describe community participation in the construction of a cross-border post in Sungai Kelik Village. The results of this research are related to Community Participation in the Construction of the National Cross-Border Post in Sungai Kelik Village. The local community fully supports the construction of the Cross-Border Post because they hope it can provide benefits, especially in terms of improving the economy and various access to development that can be directly felt by the community, such as availability, road infrastructure and communication access. Some of the community's hopes are related to the existence of a Cross-Border Post in Sungai Kelik Village, when it operates in the future, it can utilize local community resources to be employed at the Cross-Border Post*

Keywords: *Participation; Development*

Abstrak: Pembangunan kawasan perbatasan merupakan program utama yang di lakukan pemerintah dalam membuka akses yang ada di wilayah perbatasan. Pada saat ini pemerintah sangat fokus dalam membangun daerah perbatasan, salah satunya dengan membuka Pos Lintas batas antar negara. Oembangunan pos lintas batas negara ini di lakukan supaya bisa memberikan dampak kepada negara dan wilayah serta desa yang memiliki titik kordinat dalam pembangunan Pos Lintas Batas Negara itu sendiri. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara yang ada di Desa Sungai Kelik merupakan harapan dan dambaan masyarakat yang ada di Desa Sungai Kelik. Beranjak dari permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian tertakit dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang. Tujuna penelitian ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Desa Sungai Kelik. Hasil dari penelitian ini yang terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Desa Sungai Kelik Masyarakat setempat mendukung sepenuhnya, pembangunan Pos Lintas Batas karena berharap dapat memberikan manfaat terutama dalam hal meningkatkan ekonomi dan berbagai akses pembangunan yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat seperti ketersediaan infrastruktur jalan dan akses komunikasi. Bebrapa harapan masyarakat terkait dengan adanya Pos

Lintas Batas di Desa Sungai Kelik, ketika kedepan beroperasi bahwa bisa memperdayakan Sumber Daya Masyarakat setempat untuk bisa di Perkerjakan di Pos Lintas Batas tersebut.

Kata Kunci : Partisipasi; Pembangunan,

PENDAHULUAN

Pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) merupakan tantangan bagi pemerintah dalam membangun daerah perbatasan. Sesuai dengan program pemerintah pusat yang membangun Indonesia dari pingiran, maka program pembangunan yang ada di Daerah perbatasan dipandang perlu untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Malaysia Indonesia. Pada saat ini pemerintah sangat fokus untuk membangun daerah perbatasan, yang mana daerah perbatasan merupakan garda terdepan Negara, serta menjadi perbandingan bagi Negara tetangga dalam masalah pembangunan yang ada di perbatasan. Salah satu program pemerintah yang ada di perbatasan yaitu pembangunan Pos Lintas Batas (PLB).

Dengan dikeluarkannya intruksi presiden nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan pos lintas batas di daerah perbatasan Malaysia Indonesia yang ada di Kalimantan Barat. Perbatasan suatu negara memiliki peranan penting dalam penetapan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional (Elisabeth, 2016). Adapun wilayah daratan Indonesia sendiri berbatasan dengan 3 (tiga) negara di 3 (tiga) pulau dan 4 (empat) provinsi, yaitu: Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur

berbatasan darat dengan Malaysia di negara bagian Serawak dan Sabah sepanjang 2004 km (Abubakar, 2006).

Pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dihadapkan pada dua isu strategis, yaitu isu pengelolaan batas wilayah negara dan isu pengelolaan kawasan perbatasan. Belum optimalnya pengembangan, pemanfaatan potensi dan kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia (Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara, 2015). Hal tersebut menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Di pihak lain, wilayah perbatasan Malaysia sudah dilakukan perbaikan infrastruktur kebudayaan, rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga perekonomian pun menggeliat dan mampu meningkatkan pendapatan dari bidang pariwisata.

Aylin (2015) menyatakan bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang kawasannya secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan langsung berhadapan dengan negara lain. Wilayah yang

dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota yang langsung bersinggungan dengan garis batas negara (atau wilayah negara tetangga). Dalam rencana induk pengelolaan perbatasan negara (Bappenas) perbatasan didefinisikan sebagai wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dan batas-batas wilayah hanya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prud'homme (2005) menyatakan bahwa infrastruktur memainkan peranan penting dalam pengembangan kawasan perbatasan. Keberadaan infrastruktur menyediakan konektivitas dan aksesibilitas yang merupakan bagian signifikan dalam pembangunan daerah perbatasan. Kehadiran infrastruktur yang memadai dapat menunjang berbagai bentuk aktifitas masyarakat dan aparat pemerintahan, sekaligus membantu mengembangkan aktifitas dan hubungan lintas batas dan lintas negara.

Dalam hal pembangunan Pos Lintas Batas yang berada di Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, Pran Sera Masyarakat sangat di perlukan untuk mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan atau deprogramkan oleh pemerintah. Peran serta masyarakat memiliki factor penting, hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah kawasan pemukiman masyarakat yang di huni oleh masyarakat sejak turun temurun. Beranjak dari persoalan tersebut maka dipandang perlu mengkaji dan menganalisis bagaimana Peran Serta

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) di Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketugau Hulu Kabupaten Sintang. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui dan menganalisis terkait peran serta masyarakat dalam Pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) di Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian (*research methods*) adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Sedangkan metodologi penelitian adalah bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiah (*scientific reasoning*)

Dalam penelitian ini penulisan akan menggunakan penelitian deksriptif, hal ini karena data yang dihasilkan didalam penelitian adalah kata-kata yang tertulis atau lisan. Sesuai dengan pendapat dari bogdan dan Taylor (dalam Moleong) yang menyebutkan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif bersumber dari kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang terkait dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial,

budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi "*security*" dan fungsi "*prosperity*" dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan hidup di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur. Untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang tepat diperlukan rangkaian proses pengambilan keputusan yang lengkap. Dalam pengambilan keputusan tersebut diperlukan data dan informasi yang akurat untuk mendukung proses pengkajian dan analisa. Dalam kaitan tersebut, dalam kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan harus dapat merespon kondisi yang aktual. Oleh karena itu, dalam rangkaian kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan perlu dilakukan kajian tentang kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan maupun rencana pengembangan (rencana tata ruang) kawasan perbatasan. Implementasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai amanat pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah dimulai sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I (2004-2009). Untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, RPJMN II (2010-

2014) menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, dinyatakan bahwa sasaran-sasaran pokok pembangunan 5 (lima) tahun kedepan terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya keutuhan dan kedaulatan wilayah negara yang ditandai dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara;
2. Menurunnya kegiatan ilegal (transboundary crimes) dan terpeliharanya lingkungan hidup di kawasan perbatasan;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan perbatasan dan pulau kecil terluar;
4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan;
5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/kota perbatasan yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27 kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.

Pos Lintas Batas tradisional keimigrasian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung

pembangunan kawasan perbatasan, yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas penduduk di sekitar garis perbatasan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di pos lintas batas dilaksanakan oleh pejabat imigrasi.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan yang berorientasi pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah telah dikeluarkan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah kemudian menerapkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjaga serta membangun kawasan perbatasan sebagai "halaman depan bangsa". Di antara kebijakan tersebut adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang di dalamnya terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam hal ini, BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Komitmen membangun perbatasan juga tertuang dalam 9 (sembilan) Nawacita Presiden RI Joko Widodo, khususnya butir pertama dan butir ketiga. Kedua butir tersebut berbunyi menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, program pembangunan kawasan perbatasan tertuang dalam sejumlah Instruksi Presiden, yaitu: Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia) dengan garis perbatasan sepanjang kurang lebih 966 km yang terbentang di 14 kecamatan. Kabupaten Sintang sendiri memiliki 14 Kecamatan, Kecamatan Ketungau Hulu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang yang mana, Desa Sungai Kelik yang terletak di Kecamatan Ketungau Hulu merupakan salah satu Desa yang berbatasan dengan Serawak Malaysia. Selain dari itu Desa Sungai Kelik merupakan Desa yang menjadi wilayah tempat dibangunnya Pos Lintas Batas Negara Serawak Malaysia dengan Indonesia.

Kampung Sungai Kelik sendiri berdiri Tahun 1997, yang mana pada saat itu Kampung Sungai Kelik belum menjadi Desa. Namun seiring waktu berjalan dan sesuai dengan perkembangan daerah Sungai Kelik menjadi Desa pada tahun 2013. Yang mana Pejabat Sementara yang menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Kelik adalah Tommy Johanda. Pada tahun 2014 Desa sungai kelik melaksanakan pemilihan

Kepala Desa secara deventif yang mana terpilih Yusup sebagai Kepala Desa.

Jumlah Penduduk desa sungai kelik berjumlah 2670 jiwa, dengan jumlah KK 199 KK. Mayoritas pekerjaan warga sungai kelik ialah petani, ada beberapa juga pedagang, ada juga pegawai negeri dan pegawai kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sungai Kelik terkait Peran Serta masyarakat setempat dalam Pembangunan Pos Lintas Batas (PLB). Dengan adanya pembangunan Pos Lintas Batas yang ada di Desa Sungai Kelik selama ini partisipasi masyarakat dengan membebaskan lahan yang langsung berkaitan dengan program pengembangan PPLB. Selain itu bentuk partisipasi masyarakat juga dengan terlibat dalam memberikan berbagai masukan pada pemerintah untuk proses-proses pembangunan PPLB tersebut, .

Masyarakat setempat mendukung sepenuhnya, pembangunan Pos Lintas Batas karena berharap dapat memberikan manfaat terutama dalam hal meningkatkan ekonomi dan berbagai akses pembangunan yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat seperti ketersediaan infrastruktur jalan dan akses komunikasi. Bebrapa harapan masyarakat terkait dengan adanya Pos Lintas Batas di Desa Sungai Kelik, ketika kedepan beroperasi bahwa bisa memperdayakan Sumber Daya Masyarakat setempat untk bisa di Perkerjakan di Pos Lintas Batas tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada kesimpulan dalam penelitian ini terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Pos Lintas Batas di Desa Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, pada prinsipnya masyarakat di Desa Sungai Kelik sangat mendukung proses pembangunan Pos Lintas Batas yang ada di Desa sungai kelik, harapan masyarakat agar Pos ini sesegera mungkin di lanjutkan pembangunannya.

Saran

Dalam pembangunan Pos Lintas Batas yang ada di Desa Sungai Kelik masyarakat berharap bisa dilibatkan untuk diperkerjakan di Pos tersebut dengan mengedepankan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki oleh putra putri yang dari Desa sungai kelik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I, dan C. S. Bamualim, 2006, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial; Studi Tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia* , Jakarta: CSRC UIN Jakarta
- A'ing, Aylin. 2015. "Studi tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau" dalam *eJournal Pemerintahan Integratif Volume 3 Nomor 4*, 2015.

Prud'homme, Remy. 2005. The dangers of decentralization. The World Bank Research Observe

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di pos lintas batas dilaksanakan oleh pejabat imigrasi.

Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan

Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan

Intruksi presiden nomor 1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan pos lintas batas di daerah perbatasan Malaysia Indonesia yang ada di Kalimantan Barat